



**ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH, PDRB DAN IPM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI BAKORWIL V JAWA TIMUR
TAHUN 2007-2015**

SKRIPSI

Oleh

**Ulfatus Solehah
130810101214**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH, PDRB DAN IPM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI BAKORWIL V JAWA TIMUR
TAHUN 2007-2015**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Ulfatus Solehah
130810101214**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, abah M. Ali Wafa dan ummi Sa'adah, yang selalu mendo'akan yang terbaik, menjadi penyemangat, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
2. Kakakku tercinta M. Ainul Yaqin, Muhammad Wasil dan Siti Nur Latifah, ME serta adikku tersayang M. Sofyan dan Siti Masruroh yang telah memberikan support dan do'anya serta semangat selama ini;
3. Gurur-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.

*Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.*

(Ali bin Abi Thalib)

Ilmu itu bukan dihafal tetapi yang memberi manfaat.

(Imam Syafi'i)

*Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu datangnya sayap. Yakinlah
bahwa kalau kau mampu untuk terbang sendiri.*

(Audrey Gene)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfatus Solehah

NIM : 130810101214

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2007-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2018

Yang menyatakan,

Ulfatus Solehah
NIM. 130810101214

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH, PDRB DAN IPM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI BAKORWIL V JAWA TIMUR
TAHUN 2007-2015**

Oleh

**Ulfatus Solehah
NIM 130810101214**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si

Dosen Pembimbing II : Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM Terhadap
Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur
Tahun 2007-2015

Nama Mahasiswa : Ulfatus Solehah

NIM : 130810101214

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 24 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si
NIP. 19600412 198702 1 001

Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si
NIP. 19830116 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH, PDRB DAN IPM TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DI BAKORWIL V JAWA TIMUR
TAHUN 2007-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfatus Solehah

NIM : 130810101214

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

11 Mei 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember:

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Petrus Edi Suswandi, MP (.....)
NIP. 19550425 198503 1 001
2. Sekretaris : Dr. Duwi Yunitasari, SE, ME (.....)
NIP. 19780616 200312 2 001
3. Anggota : Dr. Zainuri, M.Si (.....)
NIP. 19640325 198902 1 001

Pas Foto 4 X 6
Berwarna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.CA
NIP. 197107271 199512 1 001

*ANALISIS PENGARUH TINGKAT UPAH, PDRB DAN IPM TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI BAKORWIL V JAWA TIMUR
TAHUN 2007-2015*

Ulfatus Solehah

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series* yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo tahun 2007 - 2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif statistik dan analisis regresi *panel data*. Analisis regresi *panel data* yang digunakan yaitu model pendekatan *pooled least square*, *fixed effect* dan *random effect*. Uji hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa Tingkat Upah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur. Secara simultan hasil analisis data menunjukkan variabel Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.

Kata Kunci: Tingkat Upah, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka

*Influence Analysis of Wage Rate, GDP and HDI on Open Unemployment Rate
in Bakorwil V East Java Year 2007 - 2015*

Ulfatus Solehah

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Busines, University of Jember*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Wage Rate, GDP and HDI on open unemployment rate in the territory of Bakorwil V East Java. The type of data used in this study is secondary data in the form of panel data is a combination of cross section data and time series obtained from Disnaker and Central Bureau of Statistics of Banyuwangi Regency, Bondowoso Regency, Jember Regency, Lumajang Regency, Probolinggo Regency, Situdondo Regency and Probolinggo City 2007 - 2015. Data analysis methods which is used in this research is statistical descriptive analysis and panel data regression analysis. Panel data regression analysis used are approach model of pooled least square, fixed effect and random effect. Hypothesis test using partial test (t test), simultaneous (F test), and coefficient of determination (R²). Classic assumption test using multicollinearity test, heteroscedasticity, autocorrelation and normality. From the results of data analysis shows that Wage Rate has a negative and insignificant effect on the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java. The Gross Domestic Product (GDP) has a negative and significant effect on the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java. While HDI has positive and significant effect on the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java. Simultaneously the result of data analysis showed the variable of Wage Rate, GDP and HDI together have significant effect to open unemployment rate in Bakorwil V East Java.

Keywords: Wage Rate, GDP, HDI, Open Unemployment Rate

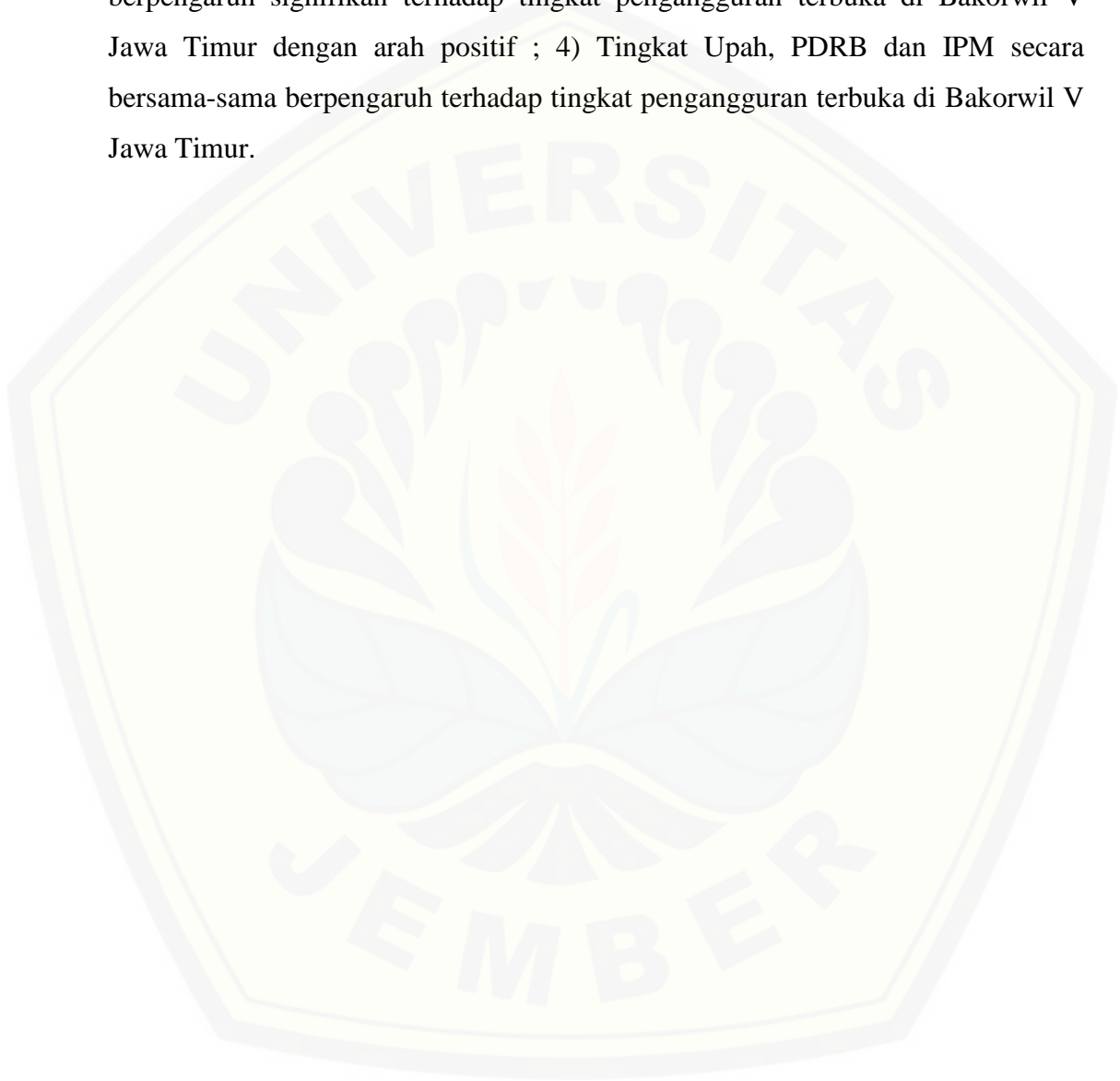
RINGKASAN

Analisis Pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2007-2015; Ulfatus Solehah, 130810101214; 2018: 104 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antar sektor. Kondisi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak daripada pertambahan penduduk. Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota di Bakorwil V Jawa Timur yaitu pengangguran merupakan masalah yang rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur tahun 2007-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Tingkat Upah, PDRB, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo periode tahun 2007 - 2015. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Deskriptif Statistik, Analisis Regresi *Panel Data*, Uji Hipotesis dan Uji Asumsi Klasik.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tingkat Upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur dengan arah negatif; 2) PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur dengan arah negatif; 3) IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur dengan arah positif ; 4) Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.



SUMMARY

Influence Analisis of Wage Rate, GDP and HDI on Open Unemployment Rate in the Bakorwil V East Java Year 2007-2015; Ulfatus Solehah, 130810101214; 2018: 102 pages; Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Economic development is essentially a process of continuous improvement of a society or social system as a whole leading to a better life, where the process of development aims to improve the welfare of the people and human dignity and the human dignity that includes the increase of basic needs goods, improvements in standards life and the expansion of economic and social choices for the whole society. The success of economic development can be seen from economic growth, economic structure and the increasing of inequality between regions, income inequality between population and between sectors. The economic development conditions of developing countries in these decades have been unable to provide more employment opportunities than population growth. One of the main problems in the economic development facing the district/city government in the Bakorwil V East Java of unemployment is a more complex and more serious problem than the problem of changes in income distribution.

The purpose of this study was to analyze the effect of Wage Rate, GDP and HDI on open unemployment rate in the Bakorwil V East Java in 2007-2015. This research uses secondary data that is Wage Rate, GDP, HDI and Open Unemployment Rate of Banyuwangi Regency, Bondowoso Regency, Jember Regency, Lumajang Regency, Probolinggo Regency, Situbondo Regency and Probolinggo City period 2007 - 2015. Data obtained are analyzed using Statistical Descriptive Analysis, Panel Data Regression Analysis, Hypothesis Test and Test Classic Assumptions.

The results of this study indicate that: 1) Wage Rate have no significant effect on open unemployment rate in the Bakorwil V East Java with negative direction; 2) GDP has significant effect on the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java with negative direction; 3) GDP has significant effect on the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java with positive direction; 4) Wage Rate, GDP and HDI jointly affect the open unemployment rate in the Bakorwil V East Java.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2007-2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyusun tugas akhir dengan kesabaran dan ketulusan;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;

7. Syaikhul Ma'had Nuris Jember KH. Muhyiddin Abdushshomad dan Nyai Hj. Hodaifah beserta keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan nasehat untuk penulis;
8. Orang tua tercinta, Ayahanda M. Ali Wafa dan Ibunda Sa'adah yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, semangat, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;
9. Kakakku tercinta M. Ainul Yaqin, Muhammad Wasil dan Siti Nur Latifah, ME. serta adikku tersayang M. Sofyan dan Siti Masruroh yang tiada henti memberikan do'a, dorongan dan semangat;
10. Teman dekat selama di bangku kuliah Maktub, Lifa, Muis dan Ilham yang telah memberikan dorongan, motivasi, kasih sayang dan canda tawa maupun keluh kesah kepada penulis;
11. Sahabat di Pondok Pesantren Nuris Jember Izzah, Farida, Muna dan Riska yang selalu memberikan do'a, dorongan, nasehat, kasih sayang dan canda tawa maupun keluh kesah kepada penulis;
12. Teman-teman konsentrasi Sumber Daya Manusia 2013 khususnya dan teman-teman IESP 2013 yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Teman-teman KKN Desa Sukoreno yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
14. Bapak ibu dan seluruh staff Kantor Badan Penelitian Statistik dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang telah memberikan data dan ijin penelitian kepada penulis;
15. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, dukungan, do'a dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini dan harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 April 2018

Penulis

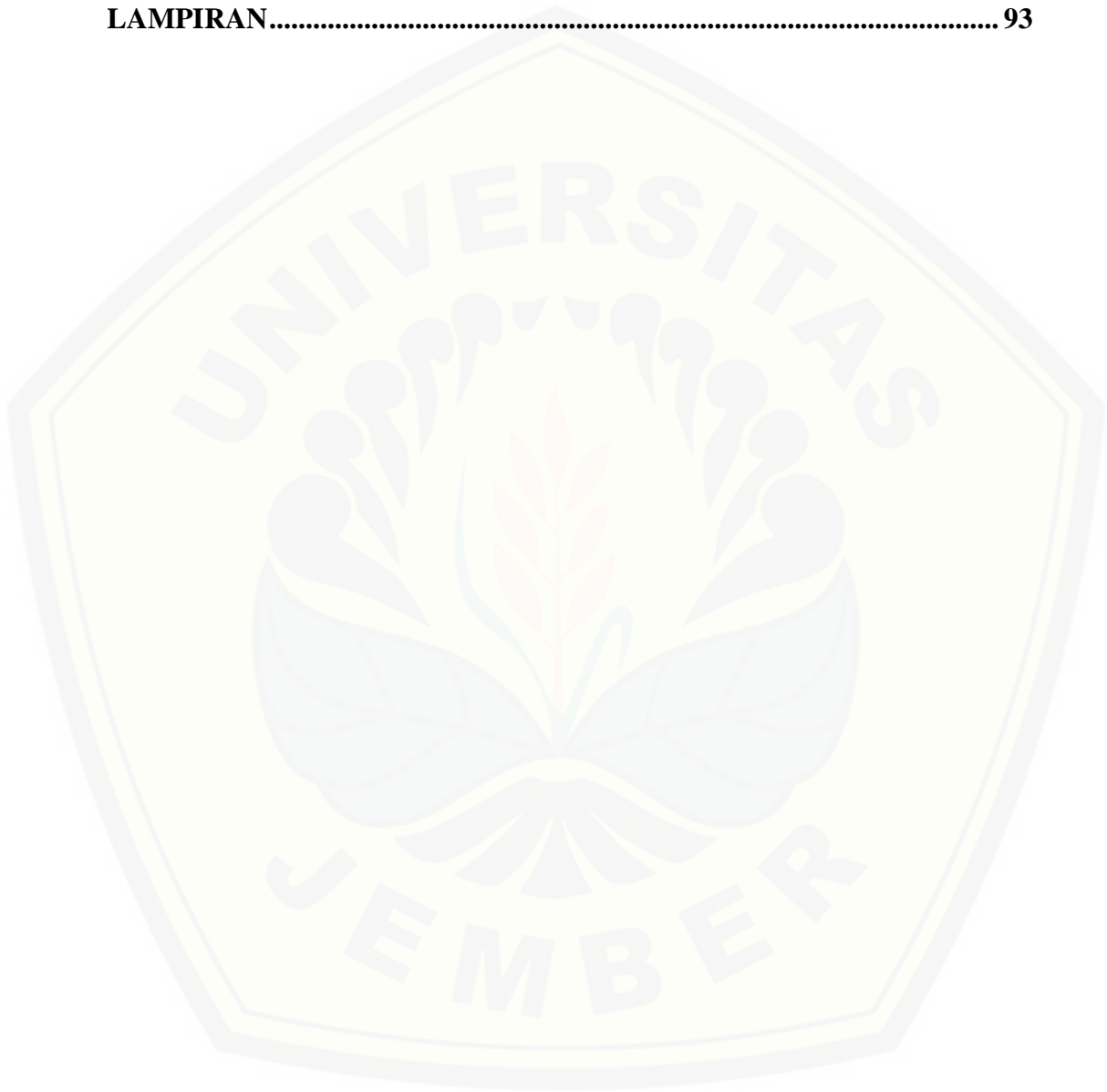
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Ketenagakerjaan	8
2.1.2 Pasar Tenaga Kerja.....	9
2.1.3 Teori Pengangguran	12

2.1.5 Teori Upah.....	15
2.1.6 Teori Produk Domestik Regional Bruto	18
2.1.7 Teori Pembangunan Manusia.....	21
2.1.8 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	24
2.1.9 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	26
2.1.10 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
2.4 Hipotesis.....	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.1.2 Unit Penelitian.....	35
3.1.3 Jenis dan Sumber Penelitian.....	35
3.2 Metode Analisis Data.....	36
3.2.1 Metode <i>Pooled Least Square</i> (PLS).....	37
3.2.2 Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	37
3.2.3 Metode <i>Random Effect Model</i> (REM)	38
3.3 Pemilihan Model Panel Data.....	39
3.3.1 Uji Chow	39
3.3.2 Uji Hausman.....	39
3.3.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	40
3.4 Uji Statistik	41
3.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	41
3.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	42
3.4.3 Uji Koefisien Determinan (R ²).....	43

3.5 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.1 Uji Multikolinearitas	44
3.5.2 Uji Heterokedastisitas	45
3.5.3 Uji Autokorelasi	46
3.5.4 Uji Normalitas	47
3.6 Definisi Operasional.....	48
BAB 4. PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	49
4.1.1 Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.2 Kabupaten Bondowoso	53
4.1.3 Kabupaten Jember	56
4.1.4 Kabupaten Lumajang	59
4.1.5 Kabupaten Probolinggo.....	62
4.1.6 Kabupaten Situbondo	65
4.1.7 Kota Probolinggo	68
4.2 Hasil Analisis Data.....	71
4.2.1 Analisis Deskriptif Statistik	71
4.2.2 Analisa Hasil Estimasi dengan Panel Data	72
4.2.3 Pemilihan Model Panel Data.....	73
4.2.4 Model Terbaik <i>Panel Data: Fixed Effect Model</i> (FEM)	74
4.2.5 Uji Statistik.....	75
4.2.6 Uji Asumsi Klasik	77
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
4.3.1 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur	83
4.3.2 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur	85
4.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur	86

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

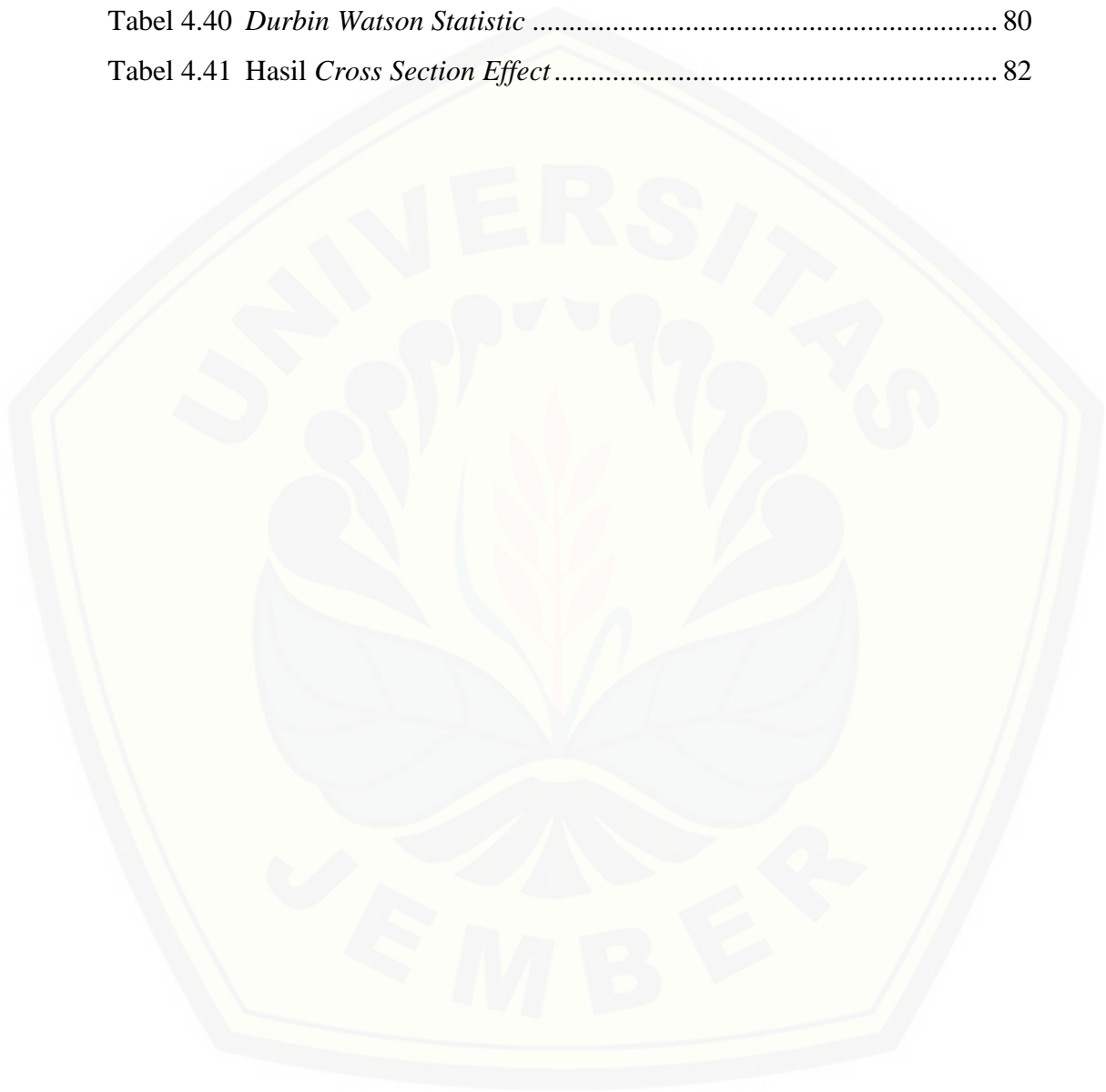


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur	3
Tabel 2.1 Kriteria Indeks Pembangunan Manusia	24
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 4.1 Pembagian Bakorwil di Jawa Timur	49
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyuwangi 2007-2015.....	50
Tabel 4.3 Tingkat Upah Kabupaten Banyuwangi 2007-2015.....	51
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi 2007-2015.....	52
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi 2007- 2015.....	52
Tabel 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bondowoso 2007-2015.....	53
Tabel 4.7 Tingkat Upah Kabupaten Bondowoso 2007-2015	54
Tabel 4.8 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bondowoso 2007-2015.....	55
Tabel 4.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso 2007- 2015	56
Tabel 4.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jember 2007- 2015	56
Tabel 4.11 Tingkat Upah Kabupaten Jember 2007-2015.....	57
Tabel 4.12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember 2007- 2015	58
Tabel 4.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember 2007-2015.....	59
Tabel 4.14 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang 2007-2015.....	59
Tabel 4.15 Tingkat Upah Kabupaten Lumajang 2007-2015	60

Tabel 4.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lumajang 2007-2015.....	61
Tabel 4.17 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang 2007-2015.....	62
Tabel 4.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Probolinggo 2007-2015.....	62
Tabel 4.19 Tingkat Upah Kabupaten Probolinggo 2007-2015	63
Tabel 4.20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo 2007-2015.....	64
Tabel 4.21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo 2007-2015.....	65
Tabel 4.22 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Situbondo 2007-2015.....	65
Tabel 4.23 Tingkat Upah Kabupaten Situbondo 2007-2015.....	66
Tabel 4.24 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Situbondo 2007-2015.....	67
Tabel 4.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Situbondo 2007-2015.....	67
Tabel 4.26 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Probolinggo 2007-2015.....	68
Tabel 4.27 Tingkat Upah Kota Probolinggo 2007-2015	69
Tabel 4.28 Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo 2007-2015	69
Tabel 4.29 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo 2007-2015.....	70
Tabel 4.30 Hasil Analisis Deskriptif Statistik Bakorwil V Jawa Timur	71
Tabel 4.31 Perbandingan Estimasi <i>Panel Data</i> Model PLS, FEM dan REM	72
Tabel 4.32 Uji Chow	73
Tabel 4.33 Uji Hausman.....	73
Tabel 4.34 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	74
Tabel 4.35 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	75

Tabel 4.36 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	76
Tabel 4.37 Hasil Uji R^2	77
Tabel 4.38 Hasil Uji Multikolinearitas.....	78
Tabel 4.39 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glesjer	79
Tabel 4.40 <i>Durbin Watson Statistic</i>	80
Tabel 4.41 Hasil <i>Cross Section Effect</i>	82



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja.....	10
Gambar 2.2 <i>Excess Demand of Labor</i>	11
Gambar 2.3 <i>Excess Supply of Labor</i>	12
Gambar 2.4 Hukum Okun.....	21
Gambar 2.5 Pengangguran Tingkat Upah.....	25
Gambar 2.6 Kerangka Konseptual	33
Gambar 3.1 Pengujian <i>Durbin-Watson</i>	46
Gambar 4.1 Hasil Uji Autokorelasi.....	80
Gambar 4.2 Hasil Uji <i>J-B Test</i>	81

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Data Analisis: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), UMK (X1) dan PDRB (X2) sebelum di Ln (Log Natural).....	93
B Data Analisis: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), UMK (X1) dan PDRB (X2) setelah di Ln (Log Natural)	95
C Statistik Deskriptif	97
D Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Pooled Least Square</i> (PLS).....	98
E Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Fixed Effect Model</i> (FEM)	99
F Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Random Effect Model</i> (REM)	100
G Hasil Uji Chow.....	101
H Hasil Uji Hausman.....	102
I Hasil Uji Multikolinearitas.....	103
J Hasil Uji Heterokedastisitas.....	103
K Hasil Uji Autokorelasi	104
L Hasil Uji Normalitas	104
M Hasil <i>Cross Section Fixed Effect</i>	104

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2006). Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan antar penduduk dan antar sektor.

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yaitu pengangguran merupakan masalah yang rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan. Kondisi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak daripada pertambahan penduduk, sehingga masalah pengangguran dari tahun ke tahun semakin serius. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dalam berpotensi menambah tingkat kemiskinan. (Siswosoemarto, 2012:460-461).

Kompleksitas permasalahan pengangguran ini memang perlu untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhannya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat

inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008:53).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, pengelompokan negara berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu masalah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Bakorwil Jawa Timur merupakan perubahan akan pembagian wilayah yang sebelumnya bernama karesidenan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, membagi wilayah kerja koordinasi di Jawa Timur menjadi 5 bagian koordinasi wilayah yang terdiri dari:

1. Bakorwil I berkedudukan di Kabupaten Madiun terdiri dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri.
2. Bakorwil II berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto.
3. Bakorwil III berkedudukan di Kota Malang terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.
4. Bakorwil IV berkedudukan di Kabupaten Pamekasan terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.
5. Bakorwil V berkedudukan di Kabupaten Jember terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo.

Secara umum, kondisi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun masih fluktuatif. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk dan angkatan kerja yang terus meningkat tetapi lapangan pekerjaan tidak mampu mengimbangnya.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur 2011-2014 (dalam persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Jawa Timur	4,25	4,16	4,12	4,30	4,19	4,20
Bakorwil I	4,43	3,90	4,05	4,28	4,41	4,22
Bakorwil II	4,84	4,53	5,14	4,85	4,09	4,69
Bakorwil III	5,95	4,65	4,70	4,58	4,83	4,94
Bakorwil IV	3,25	3,61	2,65	4,05	2,76	3,26
Bakorwil V	3,34	3,69	3,74	3,35	4,16	3,66

Sumber: BPS Jawa Timur, 2010-2014

Berdasarkan Tabel 1.1 tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur masih fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan terjadi di Bakorwil I sebesar 0,13, Bakorwil III sebesar 0,25 dan peningkatan tertinggi di Bakorwil V sebesar 0,81 sekalipun rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Bakorwil masih tergolong rendah yaitu 3,66 setelah Bakorwil III, Bakorwil II dan Bakorwil I. Meningkatnya tingkat pengangguran ini tidak lain karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan lapangan pekerjaan tidak mampu menyeimbangi.

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka mayoritas bekerja di sektor modern atau kantor. Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut biasanya mereka bersedia menunggu sedikit lebih lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau daerah lain yang kegiatan industrinya telah berkembang lebih pesat. Hal ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di wilayah tersebut. Sebaliknya, angka pengangguran

terbuka rendah di daerah atau provinsi yang kegiatan ekonominya masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan di daerah itu masih rendah (Kuncoro, 2000). Dalam pembangunan ekonomi, pengangguran merupakan masalah utama hampir di seluruh wilayah khususnya Bakorwil V Jawa Timur dan beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran diantaranya yaitu tingkat upah, PDRB dan IPM.

Setiap angkatan kerja memiliki pendapatan hasil kerja atau upah yang berbeda. Suatu kunci terhadap perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja (Samuelson, 1993: 280). Tingkat upah terendah yang diberikan oleh perusahaan adalah tingkat upah minimum. Tingkat upah minimum merupakan tingkat upah bagi tenaga kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan (Pengusaha), serikat pekerja dan pemerintah kabupaten, yang tiap tahunnya mengalami perubahan sesuai kesepakatan. Tingkat upah akan berdampak pada angkatan kerja yang ada.

Keynes berpendapat jika tingkat upah turun maka pendapatan pun akan turun, dampaknya adalah daya beli akan turun dan tentu saja pengeluaran akan berkurang maka kelebihan kapasitas produksi yang menghasilkan barang untuk dijual kepada masyarakat akan menjadi mubazir dan merugikan perusahaan, sehingga perusahaan akan memberhentikan tenaga kerjanya dan penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) tidak akan tercapai (Putong, 2007). Apabila tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran. Dimana, pemerintah masih meyakini bahwa upah minimum juga merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki nasib pekerja yang mempunyai penghasilan rendah.

Indonesia tidak mungkin menyerahkan penetapan upah pekerja atau buruh kepada mekanisme pasar, hal ini disebabkan di dalam pasar tenaga kerja masih terlihat ketidakseimbangan struktural. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan

tingkat upah. Selain itu, semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran (Simanjuntak, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Mustika, 2010).

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional cukup besar namun terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, peran tersebut menjadi beban optimal. Fenomena perekonomian saat ini cenderung menuntut adanya peran aktif dari para eksekutif untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah (Safitri, 2011). Pada dasarnya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), IPM adalah salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan keempat komponen antara lain angka harapan

hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli masyarakat yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sejak tahun 1990 United Nation Development Programme telah mengembangkan suatu indeks yaitu yang disebut Human Development Indeks (HDI) atau yang sering disebut dengan istilah IPM. Indeks ini telah dijadikan rujukan oleh negara-negara di dunia khususnya negara yang tergabung dalam PBB. IPM adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan-permasalahan seperti pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu, sebab salah satu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian/pasar kerja. Untuk melihat fenomena itu, penelitian ini ditujukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh Tingkat Upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur?
- b. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur?
- c. Seberapa besar pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur?
- d. Seberapa besar pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tingkat Upah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.
- c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.
- d. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menambah manfaat ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya masalah pengangguran terbuka

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat membantu pemerintah selaku pengambil kebijakan (*policy maker*) agar dapat menurunkan jumlah pengangguran terbuka di wilayah Karesidenan Besuki

- c. Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti lain yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ketenagakerjaan

Teori Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi, hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko, 1997).

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) menyimpulkan bahwa “Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berumur minimal 15 tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang atau jasa”.

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No.14 tahun 1990, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sumarsono, 2009:7).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:

a. Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:xvi) menyimpulkan bahwa “Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja”.

Angkatan kerja adalah penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan, digolongkan sebagai berikut (Sumarsono, 2009:7):

- 1) Mereka yang selama seminggu melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan.
- 2) Mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang keahliannya.

b. Bukan Angkatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:xvi) menyimpulkan bahwa “Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi”.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa, jadi bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, digolongkan sebagai berikut (Sumarsono, 2009:7):

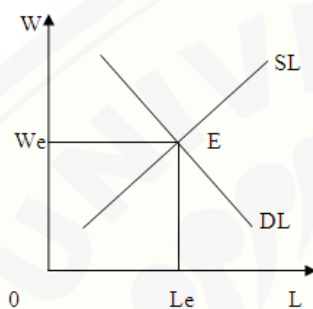
- 1) Golongan yang masih bersekolah
- 2) Golongan yang mengurus rumah tangga
- 3) Golongan lain-lain, yaitu golongan yang menerima pendapatan tanpa melakukan kegiatan dan golongan yang hidupnya tergantung pada orang lain.

2.1.2 Pasar Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono (2009:10) menyimpulkan bahwa “Pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja”.

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini memiliki pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar (Santoso, 2012:60).

Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja



Sumber: Mankiw (2003:524)

Dimana:

W : Upah riil

We : Upah keseimbangan

L : Jumlah tenaga kerja

Le : Jumlah tenaga kerja keseimbangan

E : Keseimbangan permintaan dan penawaran

SL : Penawaran tenaga kerja (*Supply of Labor*)

DL : Permintaan tenaga kerja (*Demand of Labor*)

Gambar 2.1 memperlihatkan pasar tenaga kerja dalam kondisi seimbang (*Equilibrium*). Dimana jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar L_e pada tingkat upah keseimbangan W_e . Titik-titik keseimbangan adalah titik E. Disini tidak ada *excess supply of labor* maupun *excess demand of labor*. Pada tingkat upah keseimbangan sebesar W_e maka semua orang yang ingin

bekerja telah mendapat pekerjaan, berarti tidak ada orang yang menganggur (Mankiw, 2003:524).

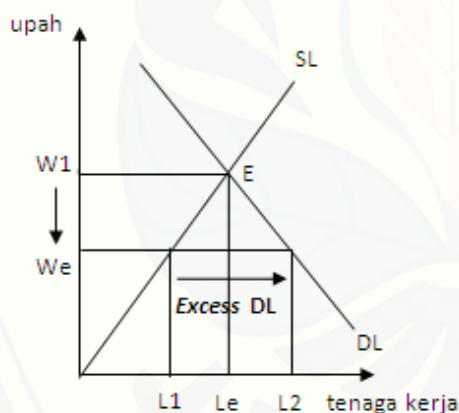
a. Permintaan Tenaga Kerja (*Demand of Labor*)

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, dimana hubungan keduanya biasanya bersifat negatif. Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan barang atau jasa (Santoso, 2012:76).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi (Sumarsono, 2009:12).

Teori kurva permintaan tenaga kerja sebagai berikut:

Gambar 2.2 *Excess Demand of Labor*



Sumber: Subri (2003:55)

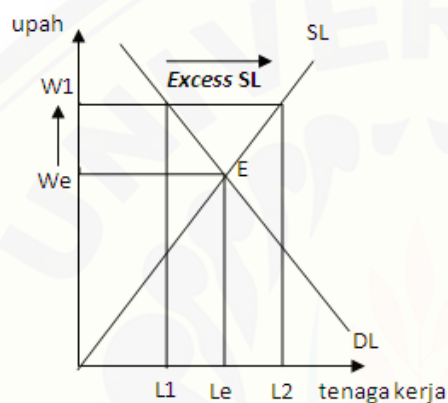
Gambar 2.2 diketahui bahwa ketika tingkat upah turun, dari W_1 ke W_e akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_2 . Namun pada tingkat upah yang rendah, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebesar L_1 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan permintaan tenaga kerja (Subri, 2003:55).

b. Penawaran Tenaga Kerja (*Supply of Labor*)

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah terutama untuk jenis jabatan yang sifatnya khusus, akibatnya kenaikan dari upah akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan (Sumarsono, 2009:13).

Teori kurva penawaran tenaga kerja sebagai berikut:

Gambar 2.3 *Excess Supply of Labor*



Sumber: Subri (2003:55)

Gambar 2.3 diketahui bahwa ketika tingkat upah naik, dari W_e ke W_1 akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah sebesar L_1 . Namun dengan tingkat upah yang tinggi, jumlah tenaga kerja yang menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebesar L_2 , sehingga pada L_1 dan L_2 terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja (Subri, 2003:54).

2.1.3 Teori Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya (Sukirno, 2010:355).

Menurut Lipsey dkk (1992,:06), pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Angkatan yang Tidak Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sukirno (2010:328) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

a. Pengangguran Friksional

Jenis pengangguran ini adalah bukan karena tidak ada pekerjaan atau tidak memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini disebabkan karena penurunan permintaan agregat, maka perusahaan akan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.

c. Pengangguran struktural

Pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Perusahaan yang mengalami kemerosotan dan kemunduran karena beberapa faktor antara lain: kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu untuk bersaing, hal itu akan menyebabkan kegiatan produksi menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan karena penggantian tenaga manusia oleh tenaga mesin dan bahan kimia (teknologi).

Menurut Simanjuntak (dalam Sisputro, 2013:46), di negara yang sedang berkembang pengangguran dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Pengangguran yang Kelihatan (*Visible Underemployment*)

Pengangguran yang kelihatan akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup atau disediakan untuk bekerja.

2. Pengangguran tak Kentara

Pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor atau perusahaan lain tanpa mengurangi output.

3. Pengangguran Potensial

Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada *disguised unemployment*, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output, hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan pembentukan *capital* yang berarti.

Menurut Sukirno (dalam Sisputro, 2013:48), berdasarkan cirinya pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok yaitu:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari kegiatan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployment*) dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.4 Teori Upah

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan memproduksi adalah tenaga kerja, dengan mengolah barang mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi atau dikenal dengan proses produksi sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa upah.

Upah dalam pengertian teori ekonomi dapat dikatakan bahwa suatu pembayaran kepada tenaga kerja atas jasa-jasanya dalam bekerja yang disediakan oleh para pengusaha serta jumlah keseluruhan pengganti jasa yang telah

dikeluarkan oleh tenaga kerja ditentukan oleh syarat atau masa tertentu (Sukirno, dalam Kistanto, 2013). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan pada Bab I pasal 1 nomor 30 menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang akan diterima tenaga kerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha yang telah disepakati menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Upah jika dikaitkan dengan pengangguran atau tenaga kerja sangat berhubungan erat dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja akan berpengaruh kepada tingkat upah yang akan diberikan oleh pengusaha.

Menurut pandangan klasik menjelaskan tingkat upah dimana pada suatu negara penggunaan tenaga kerja secara penuh akan tercapai karena mekanisme pasar tenaga kerja dimana akan mengurangi pengangguran bahkan dihapuskan (Tohar, 2000). Apabila terjadi pengangguran, maka pengangguran tersebut bersedia dibayar dengan upah yang lebih rendah sehingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Sedangkan menurut pandangan Keynes menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran kaum pekerja yang ahli dan bersertifikat serta kuatnya persatuan tersebut menjadikan pihak perusahaan tidak mudah menurunkan tingkat upah yang berlaku. Pandangan Keynes ini menjelaskan dimana tingkat upah turun menyebabkan pendapatan juga mengalami penurunan, penurunan pendapatan ini akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, selanjutnya menyebabkan kapasitas produksi tidak terserap secara maksimal yang akan membuat perusahaan merugi dan akan membuat PHK diberlakukan dan pengangguran akan cenderung meningkat (Tohar, 2000).

Menurut Ricardo dalam teorinya yang menjelaskan tentang upah alam menyebutkan bahwa upah menurut kodrat merupakan upah yang hanya cukup memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya (Suparmoko, 2007). Pada pasar sendiri terjadi upah menurut harga pasar yang merupakan upah yang terjadi di pasar dengan melihat mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Teori upah yang lainnya adalah teori besi yang dikemukakan oleh David Ricardo

dimana upah ini dipengaruhi interaksi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Teori ini cenderung merugikan para pengusaha dan tenaga yang belum mendapat pekerjaan dimana kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja yang akan menyebabkan tenaga kerja yang menganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kenaikan biaya produksi (Lestyasari, Tanpa Tahun). Kenaikan biaya produksi ini secara tidak langsung berpengaruh pada kenaikan harga barang di pasar. Kondisi kenaikan harga barang disebabkan kenaikan biaya produksi ini menimbulkan inflasi. Tingkat upah dipengaruhi oleh tiga komponen diantaranya (Ananta, dalam Utomo, 2013):

a. Kebutuhan Fisik Minimum

Komponen ini didasarkan pada kebutuhan pokok tenaga kerja yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

b. Indeks Harga Konsumen

IHK merupakan patokan yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan hidup dimana perkembangan ini secara tidak langsung mencerminkan inflasi.

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam komponen pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan keadaan perekonomian di suatu daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perusahaan yang ada di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Berdasarkan peraturan menteri menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas UMP atau UMK dan UMSP atau UMSK.

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten di satu provinsi di Indonesia. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan penetapan secara serentak pada tanggal 1 November di setiap provinsi di Indonesia.

2. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

UMK merupakan upah minimum yang hanya berlaku di wilayah kabupaten atau kota.

3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)

UMSP merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi di Indonesia.

4. Upah Minimum Sekrotal Kabupaten (UMSK)

UMSK merupakan upah minimum yang berlaku secara sektoral yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota.

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum bab 2 pasal 3 mengenai dasar dan wewenang penetapan upah minimum diantaranya:

Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

1. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL.
2. Pencapaian KHL merupakan perbandingan upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
3. Dalam pencapaian KHL Gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL, bagi perusahaan industri padat karya tertentu dan bagi perusahaan yang lainnya dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha lainnya.

2.1.5 Teori Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sadono Sukirno, 2005).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto, baik atas harga dasar berlaku maupun atas harga dasar konstan. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2008).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi neto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam perhitungan PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi di atas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto. Dalam penelitian ini PDRB diinterpretasikan menurut pendekatan produksi. Dalam perhitungan yang dijumlahkan adalah nilai tambah dari produksi atau *value added* yang diciptakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perhitungan dua kali, di samping itu juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam menciptakan produk nasional. Alasan ini yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah karena data statistik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pendekatan produksi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Dalam penyajiannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk yaitu:

1. Atas Dasar Harga Konstan

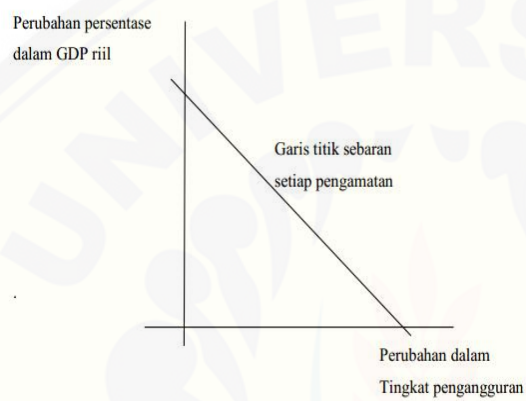
Yaitu PDRB dihitung menurut harga tetap, dengan cara menilai kembali (mendeflasikan) berdasarkan pada harga-harga pada tahun dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2. Atas Dasar Harga Berlaku

Yaitu PDRB yang didasarkan atas dasar harga pasar yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti belum diperhitungkan perubahan harga atau perkembangan ekonomi yang terjadi saat itu, antara lain pengaruh inflasi misalnya. Seseorang ahli ekonomi, Okun yang memperkenalkan Hukum Okun (Mankiw, 2007) menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP (Gross Domestic Product) riil, di mana

terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dengan GDP riil. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesempatan kerja dengan GDP riil. Okun menggunakan data tahunan dari Amerika Serikat untuk menunjukkan hukum Okun ini seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4 Hukum Okun



Sumber: Mankiw, 2007

Gambar 2.4 di atas ini merupakan titik sebar dari perubahan dalam tingkat pengangguran pada sumbu horizontal dan perubahan persentase dalam GDP riil pada sumbu vertikal. Gambar ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat kaitannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun, seperti terlihat pada garis titik sebar pengamatan yang berslope negatif.

2.1.6 Teori Pembangunan Manusia

Teori Human Capital dikembangkan oleh Theodore Schultz yang beranggapan bahwa sumber daya manusia (SDM) dianggap sebagai capital goods yang dapat menentukan upaya pencapaian manfaat dan produktivitas sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti teknologi, mesin, tanah dan uang. Schultz (1986) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan adalah suatu bentuk investasi SDM dan bukan kegiatan konsumtif.

Pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Sebagai investasi, pendidikan akan menghasilkan timbal balik (*return*), yaitu timbal balik bagi individu (*individual return*) dan timbal balik bagi sosial (*social return*). Timbal balik individu berarti individu yang bersangkutan akan menerima pendapatan dan pendidikan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menerima pendapatan. Timbal balik sosial menunjukkan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka individu akan semakin memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat (Ali, 2009:71).

Mengaca dari kondisi tersebut sudah seharusnya pemerintah memperbaiki konsep pembangunan ekonomi yang tidak mengejar hasil pencapaian pertumbuhan yang tinggi saja tetapi juga tercapainya kualitas hidup masyarakatnya yang tinggi. Sudah seharusnya di dalam melaksanakan pembangunan dipakai konsep pembangunan manusia yang mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas bukan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah harus dapat membawa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan berkesinambungan. Melalui konsep pembangunan manusia tersebut maka pemerintah harus membawa pembangunan yang mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian, sehingga di samping tetap memperhatikan upaya meningkatkan kapabilitas manusia tetapi juga memanfaatkan kemampuan masyarakat tersebut untuk berperan aktif di dalam mengisi pembangunan dengan bersinergi bersama masyarakat lainnya secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas dalam hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (BPS, 2013).

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), IPM adalah salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan keempat komponen antara lain angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli masyarakat yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sejak tahun 1990 *United Nation Development Programme* telah mengembangkan suatu indeks yaitu yang disebut Human Development Indeks (HDI) atau yang sering disebut dengan istilah IPM. Indeks ini telah dijadikan rujukan oleh negara-negara di dunia khususnya negara yang tergabung dalam PBB. IPM adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM adalah suatu ukuran kualitas hidup. IPM dibangun atas tiga dimensi dasar antara lain:

1. Dimensi Kesehatan,
2. Dimensi Pengetahuan, dan
3. Dimensi Hidup Layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selanjutnya, dimensi hidup layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Menurut Arifin (2015:6), IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di suatu daerah dengan beberapa alasan yakni: *pertama*, IPM merupakan indikator

penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. *Kedua*, menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk merasakan hasil dari proses pembangunan yang merupakan bagian dari haknya seperti memperoleh kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan memperoleh pendapatan. *Ketiga*, digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya pembangunan kualitas masyarakat. *Keempat*, IPM merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia meskipun belum tentu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Untuk dapat melihat kriteria IPM, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB mempunyai konsep pembangunan manusia yang dikembangkan dengan menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 sampai 100,0. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1 Kriteria Indeks Pembangunan Manusia

No	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Tinggi	$IPM \geq 80,0$
2	Tinggi	$70,0 \leq IPM < 80,0$
3	Sedang	$60,0 \leq IPM < 70,0$
4	Rendah	$IPM < 60,0$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Dengan adanya kriteria tersebut maka dapat memudahkan untuk melihat tingkat IPM di suatu wilayah. Selain itu, kriteria tersebut dapat dijadikan tolok ukur IPM untuk melihat kualitas penduduk.

2.1.7 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Teori Kekakuan Upah (*Wage Rigidity*) dimana penentuan kebijakan kenaikan upah akan berdampak negatif pada sisi pengusaha, sehingga pengusaha akan mengambil keputusan efisiensi tenaga kerja dengan pengurangan tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi. Maka hal ini akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat.

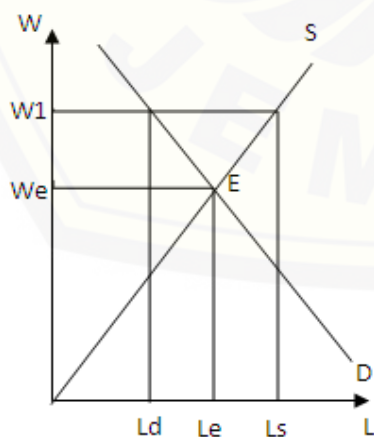
Menurut Alghofari (2010:15) menyimpulkan bahwa “Tenaga kerja menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu. Jika seluruh

upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, seorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan hal ini akan menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Apabila ditinjau dari sisi pengusaha, meningkatnya upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan pengangguran”.

Kenaikan tingkat upah produk riil pada keseluruhan sistem ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, berarti bahwa beberapa pabrik dan perusahaan tidak akan mampu lagi menutup biaya-biaya variabel mereka sehingga akan gulung tikar. Jika perusahaan melakukannya, maka tingkat pengangguran akan naik (Lipsey dkk, 1992:284).

Menurut Sumarsono (2009:259) menyimpulkan bahwa “Adanya hubungan positif antara tingkat upah dengan pengangguran, karena apabila tingkat upah mengalami peningkatan maka mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja menjadi kecil dan pengangguran akan semakin meningkat”. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5 Pengangguran Tingkat Upah



Sumber: Sumarsono (2009:259)

Tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah di titik E yaitu dengan tingkat upah sebesar W_e dan permintaan tenaga kerja sebanyak L_e . Sedangkan apabila tingkat upah meningkat atau lebih tinggi dari pada upah keseimbangan (W_e) yaitu sebesar W_1 , maka permintaan tenaga kerja akan lebih kecil yaitu sebesar L_d , sehingga terjadi pengangguran sebesar $L_d - L_s$ (Sumarsono, 2009:259).

2.1.8 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi di suatu wilayah (BPS 2000: 1-2). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu sebagai dimana dalam perhitungan ini tahun dasar 2000. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat penyesuaian dan struktur ekonomi sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Hubungan antara tingkat PDRB yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw. Hal ini didasarkan pada Hukum Okun, yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya PDRB suatu daerah. Menurut Arthur Okun (Okun's Law) mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi (GDB) maka akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran (Arsyad, 2010:360).

2.1.9 Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam perkembangannya, peningkatan IPM menjadi indikator utama sebagai hasil akhir tujuan pembangunan daerah dalam kerangka perwujudan otonomi daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Di bidang kesehatan pencapaian keberhasilan yang diperoleh yaitu menurunnya balita gizi buruk, meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi dan meningkatnya cakupan distribusi vitamin A. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penanganan masalah umum yaitu masalah substantif dan masalah khusus yaitu penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkatan pengangguran yaitu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bappeda Jember, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu dari berbagai studi empiris yang dijadikan landasan berfikir sebagai berikut:

Farid Alghofari (2010) yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat

inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran.

Dania Safia Safitri (2011) yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Berganda. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan nilai signifikansi 0,557 sedangkan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar 0,04 terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, hal ini dapat diketahui dari uji F 2168 dengan nilai signifikansi 0,04.

Fendy Ferdiansyah (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember Tahun 1998-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat inflasi, PDRB, UMK dan Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Berpengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai probabilitas F hitung 0,012360 lebih kecil dari level signifikan α (5%) yang berarti bahwa inflasi, PDRB, UMK dan kesempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Jember.

Soekarnoto dan Tengko Sarimuda RB (2014) yang berjudul “Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, UMK, inflasi dan investasi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan model regresi data panel. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, UMK, Inflasi dan

Investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan inflasi dan investasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.

Amri Amir (2007) yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46%. Maka penggambaran kurva Phillips yang menghubungkan tingkat inflasi dengan pengangguran untuk kasus di Indonesia tidak tepat digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980-2005 ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Farid Alghofari (2010). <i>Skripsi</i> . Universitas Diponegoro	Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007	Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Besaran Upah, Pertumbuhan Ekonomi.	Statistik deskriptif dan Analisis Korelasi	Jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran.
2	Dania Safia Safitri (2011). <i>Skripsi</i> . Universitas Negeri Semarang	Pengaruh Inflasi dan PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993-2009	Pengangguan Terbuka, Inflasi dan PDRB	Regresi Berganda	Variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan nilai sig. 0,557 sedangkan PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan sebesar 0,04 terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Secara bersama-sama variabel inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, hal ini dapat diketahui dari uji F 2168 dengan nilai sig. 0,04.
3	Fendy Ferdiansyah (2014). <i>Skripsi</i> . Universitas Jember	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember Tahun 1998-2011	Tingkat Pengangguran, Inflasi, PDRB, UMK, dan Kesempatan Kerja.	Regresi Berganda	Tingkat inflasi, PDRB, UMK dan Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Berpengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai probabilitas F hitung 0,012360 lebih kecil dari level signifikan α (5%) yang berarti bahwa inflasi, PDRB, UMK dan kesempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Jember

4	Soekarnoto dan Tengko Sarimuda RB (2014). <i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> Volume 24, Nomor 2, 2014	Pengaruh UMK, Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011	Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi. Pengangguran terbuka, PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi.		Secara simultan PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun 2007-2011. Sementara secara parsial, PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011. Sedangkan inflasi dan investasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011.
5	Amri Amir (2007). <i>Jurnal Iflasi dan Pengangguran</i> . Volume 1, Nomor 1, 2007	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia	Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP)	Regresi Linear Berganda	Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, maka pengangguran akan menurun sekitar 0,46%. Maka penggambaran kurva Phillips yang menghubungkan tingkat inflasi dengan pengangguran untuk kasus di indonesia tidak tepat digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran. Hasil analisis statistik pengaruh inflasi terhadap pengangguran selama periode 1980-2005 ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

2.3 Kerangka Konseptual

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Indonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan jumlah pengangguran.

Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan jumlah pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata per provinsi dalam satu tahun.

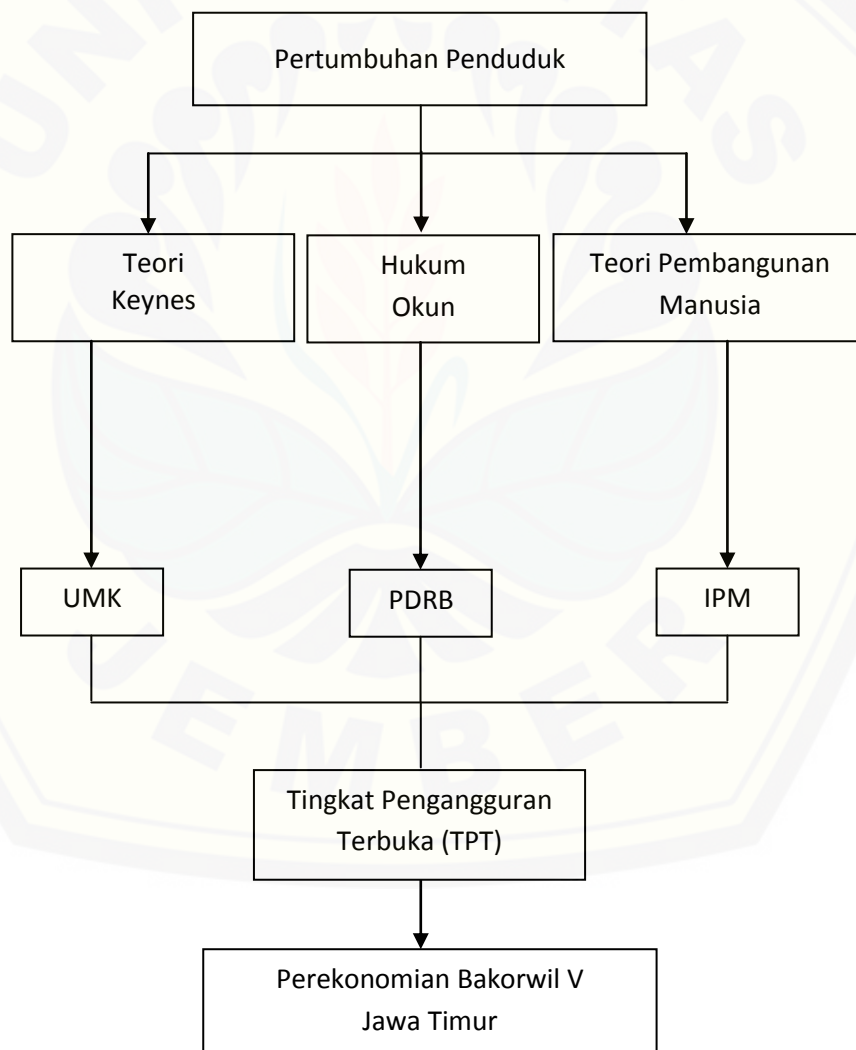
Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan GDP akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi.

Melalui konsep pembangunan manusia pemerintah harus membawa pembangunan yang mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian, sehingga di

samping tetap memperhatikan upaya meningkatkan kapabilitas manusia tetapi juga memanfaatkan kemampuan masyarakat tersebut untuk berperan aktif di dalam mengisi pembangunan dengan bersinergi bersama masyarakat lainnya secara optimal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas dalam hidup.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari. Hipotesis merupakan sarana penelitian yang penting dan tidak dapat ditinggalkan karena merupakan instrumen kerja dari teori. Satuan hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang dimaksud adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan mungkin tanpa keyakinan agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis, dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenaran dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian (J. Supranto, 1993).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan berkaitan dengan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh UMK, PDRB dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur serta pembangunan konseptual yang ada, sehingga dirumuskanlah beberapa hipotesis sebagai tolak ukur dan pembuktian teori serta menjadi fokus penelitian, diantaranya:

1. Tingkat Upah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur
2. PDRB berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur
3. IPM berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur
4. Tingkat Upah, PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai tujuan penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif explanatory* yaitu penelitian metode secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada tidaknya sifat hubungan dua variabel atau lebih serta untuk menguji hipotesis (Nazir, 2003).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan Tingkat Upah, PDRB dan IPM masing-masing Kabupaten/Kota di Bakorwil V Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kota Probolinggo) sebagai variabel bebas (*independent variable*) selama kurun waktu tahun 2007 – 2015.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*polling data*) yang merupakan gabungan dari tujuh Kabupaten/Kota di Bakorwil V Jawa Timur dengan kurun waktu selama tahun 2007–2015. Data yang digunakan adalah data Tingkat Upah, PDRB, IPM dan tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu tahun 2007-2015. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), jurnal ilmiah, internet dan lain sebagainya.

3.2 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bakorwil V Jawa Timur maka digunakan model regresi *panel data*. Ekananda (2015:369) menjelaskan di dalam ekonometrika, proses penyatuan data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*) disebut dengan *pooling*. Sedangkan data yang dihasilkan disebut dengan *pooled data* atau *panel data*. Terdapat keuntungan yang diperoleh apabila sebuah penelitian menggunakan *panel data*, yaitu:

1. Semakin banyak jumlah observasi yang dimiliki akan membawa dampak positif dengan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel bebas.
2. Dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik menurut waktu secara terpisah. Dengan menerapkan data panel, secara bersama akan dapat diestimasi karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dari masing-masing variabel bebas tersebut. Dengan demikian, analisa hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang mendekati realita.

Adapun fungsi dari model ekonomi variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$TPT = f(UMK, PDRB, IPM)$$

Fungsi diatas kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika, sehingga menjadi:

$$TPT = \alpha + b_1UMK_{i,t} + b_2PDRB_{i,t} + b_3IPM_{i,t} + e_{i,t}$$

Dimana:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

UMK = Tingkat Upah Minimum Kabupaten

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

α = Intersep

b = Koefisien variabel

e = *Error term*

$i = 1, 2, \dots, N$ (banyaknya sampel/observasi)

$t = 1, 2, \dots, N$ (banyaknya waktu)

Variabel dependen dan variabel independen memiliki perbedaan satuan, sehingga persamaan regresi ditransformasikan ke dalam logaritma (logaritma natural) terlebih dahulu. Logaritma (logaritma natural) yaitu log basis e , dimana e bernilai 2,718 linear dalam logaritma untuk variabel Y dan X , serta dapat diestimasi dengan menggunakan metode regresi OLS (Gujarati, 2013:211). Persamaannya sebagai berikut:

$$TPT = \alpha + b_1 *UMK_{i,t} + b_2 LOG *PDRB_{i,t} + b_3 *IPM_{i,t} + e_{i,t}$$

Berkaitan dengan penggunaan *panel data* dalam penelitian ini, maka digunakan tiga teknik analisis, yaitu sebagai berikut (Ekananda, 2015:405):

3.2.1 Metode *Pooled Least Square* (PLS)

Model *pooled* juga sering disebut sebagai model *common* atau *homogeneity*. PLS adalah struktur model di mana estimator akan menghasilkan *intercept* α dan *slope* b sama untuk setiap individu ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$ dan $b_{k1} = b_{k2} = b_{k3} = \dots = b_{ki}$). Dimana k adalah jenis variabel dan i adalah observasi ke- i . Persamaan yang digunakan adalah:

$$TPT_{i,t} = \alpha + b_1 *UMK_{i,t} + b_2 LOG *PDRB_{i,t} + b_3 *IPM_{i,t} + e_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan tidak adanya perbedaan karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap Kabupaten/Kota selama waktu observasi.

3.2.2 Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) dari variabel independen menurut individu. Keberagaman individu diketahui melalui *intercept* α yang berbeda untuk setiap individu. Dampak dari setiap variabel independen dipertahankan sama untuk setiap individu sepanjang waktu observasi ($\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \dots \neq \alpha_i$ dan $b_{k1} = b_{k2} = b_{k3} = \dots = b_{ki}$). Persamaan yang digunakan adalah:

$$TPT_{i,t} = \alpha + b_1 *UMK_{i,t} + b_2 LOG *PDRB_{i,t} + b_3 *IPM_{i,t} + e_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap Kabupaten/Kota selama waktu observasi. Penggunaan kata *fixed* pada model FEM menunjukkan bahwa faktor penyebab heterogenitas di setiap individu diasumsikan tetap sepanjang waktu observasi. Pengaruh yang tetap dapat dilihat dari penggunaan nilai yang sama (yaitu 1) sepanjang waktu. Nilai 1 ditempatkan pada tertentu dan nol untuk individu lainnya. Konsep ini disebut sebagai variabel *dummy*. Secara umum struktur model dalam bentuk *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) adalah:

$$TPT_{i,t} = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + b_1 *UMK_{i,t} + b_2 LOG *PDRB_{i,t} + b_3 *IPM_{i,t} + e_{i,t}$$

3.2.3 Metode *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan *Random Effect Model* mempertimbangkan setiap persamaan karakteristik individu. Penentuan α dan b didasarkan pada asumsi bahwa *intercept* α terdistribusi *random* antar unit μ_1 . Dengan kata lain, *slope* memiliki nilai yang tetap tetapi, *intercept* bervariasi untuk setiap individu. Sehingga persamaan untuk model ini adalah:

$$TPT_{i,t} = \alpha_{li} + b_{UMK} *UMK_{i,t} + b_{PDRB} *PDRB_{i,t} + \mu_{it} + e_{i,t}$$

Dari model ini dapat dilihat bahwa *slope* b memiliki nilai tetap tetapi, *intercept* α_{li} memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh *random* e_i terhadap *intercept* α_i ($\alpha_{li} = \alpha_i + e_i$) yang bernilai tetap. Model ini diasumsikan bahwa pengaruh dari setiap individu sama.

3.3 Pemilihan Model Panel Data

Seperti yang dijelaskan pada Sub Bab 3.2, dalam *panel data* terdapat tiga teknik analisis yang dapat digunakan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga teknik analisis tersebut dipilih salah satu model yang terbaik dengan melakukan pengujian Chow, Hausman dan *Lagrange Multiplier* (LM) sebagai berikut:

3.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang paling tepat antara *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 = Menggunakan *Pooled Least Square* (PLS)
2. H_A = Menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi Square* sebagaimana berikut:

1. $F_{\text{statistik}} \leq F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara efek individu dengan variabel bebas sehingga model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS).
2. $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_A). Artinya, efek individual berkorelasi dengan variabel bebas sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) (Ansofino *et al*, 2016:153).

3.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan metode mana yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Ekananda, 2015:405):

1. H_0 = Menggunakan *Random Effect Model* (REM)
2. H_A = Menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi Square* sebagaimana berikut:

1. $Chi_{\text{statistik}} \leq Chi_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $Chi_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara efek individu dengan variabel bebas sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. $Chi_{\text{statistik}} > Chi_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $Chi_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_A). Artinya, efek individual berkorelasi dengan variabel bebas sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila dalam uji Hausman hasil model yang terbaik adalah *Random Effect*, maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hal ini untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS dan sebaliknya. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 = Menggunakan *Pooled Least Square* (PLS)
2. H_A = Menggunakan *Random Effect Model* (REM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi Square* sebagaimana berikut:

1. $LM_{\text{statistik}} \leq Chi_{\text{statistik}}$ atau nilai probabilitas $LM_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, metode yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. $LM_{\text{statistik}} > Chi_{\text{statistik}}$ atau nilai probabilitas $LM_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_A). Artinya, metode yang paling tepat digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS).

3.4 Uji Statistik

Selain beberapa pengujian, juga dilakukan uji statistik untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikan, baik pengujian secara persial (uji t) maupun pengujian secara simultan (uji F).

3.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel *independent* (Tingkat Upah, PDRB dan IPM) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* (tingkat pengangguran terbuka). Menurut Supranto (1995:276), uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

F = pengujian secara simultan

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel *independent* termasuk konstanta

n = jumlah sampel

Rumusan hipotesis:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$, artinya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur secara bersama-sama.

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$, artinya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur secara bersama-sama.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesis:

1. Bila probabilitas $f_{\text{hitung}} \leq \alpha$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Bila probabilitas $f_{\text{hitung}} > \alpha$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t statistik)

Uji t statistik dilakukan untuk melihat signifikansi parameter variabel *independent* secara individu yang dapat menjelaskan variabel *dependent* dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{S(b_i)}$$

Dimana:

- t = pengujian secara parsial
- b_i = besarnya perubahan dari variabel bebas
- S_{b_i} = *standart error* atau taksiran kesalahan

Untuk menguji pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dapat dibuat hipotesis:

$H_0 : b_1 = 0$, berarti tidak ada pengaruh nyata antara Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur

$H_0 : b_1 \neq 0$, berarti ada pengaruh nyata antara Tingkat Upah, PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur

Dengan menggunakan $\alpha=5\%$, hipotesis:

1. H_0 diterima H_a ditolak, apabila nilai probabilitas hitung $>$ nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti variabel *independent* tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel *dependent*
2. H_0 ditolak H_a diterima, apabila nilai probabilitas hitung \leq nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti variabel *independent* signifikan berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

3.4.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel *independent* dapat menerangkan dengan baik variasi variabel *dependent*. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dapat digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi *dependent* dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel *independent* yang dimasukkan dalam model.

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{b_1 \Sigma X_1 Y + b_2 \Sigma X_2 Y + b_3 \Sigma X_3 Y}{\Sigma Y^2}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

ESS = jumlah kuadrat regresi

TSS = jumlah kuadrat (regresi + residual)

b = koefisien regresi

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka

X_1 = Tingkat Upah

X_2 = PDRB

X_3 = IPM

Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas (*independent*) dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas (*dependent*) dan sangat terbatas.
2. Nilai R^2 mendekati satu, artinya kemampuan variabel-variabel bebas (*independent*) dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas (*dependent*).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Selain beberapa pengujian yang dilakukan pada model empiris, dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa uji asumsi klasik, seperti uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, dan uji Normalitas.

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005:91), uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independent*. Jika variabel *independent* saling berkorelasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel *independent* yang nilai korelasinya antar variabel *independent* sama dengan nol.

Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah :

- a. Mudrajat Kuncoro (2003), menyatakan bahwa multikolinearitas terjadi apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi salah satu atau kedua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat.
- b. Gujarati (2003) lebih tegas mengatakan, bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius.

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi menggunakan *Auxilliary Regression* yaitu dengan membandingkan besar nilai model utama dengan variabel-variabel independennya secara parsial. Jika model utama lebih besar daripada variabel-variabel independennya maka tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2006).

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varian dari nilai sisa adalah tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika varian dan nilai sisa sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, maka kondisi ini disebut homoskedastisitas. Regresi yang baik adalah regresi yang berada dalam posisi homoskedastisitas dan bukan dalam kondisi heteroskedastisitas (Gani dan Amalia, 2015:126).

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi uji Glesjer. Uji dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Algifari, 2011:86). Perumusan hipotesis dari uji Glesjer adalah:

1. H_0 : varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. H_A : varian dari nilai sisa bernilai sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan:

1. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa dalam model penelitian terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika $t_{\text{statistik}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_A). Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa dalam model penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. (Algifari, 2011:86)

3.5.3 Uji Autokorelasi

Tujuan dari autokorelasi adalah menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2005:96). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* dilakukan dengan perhitungan berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan (Sumodiningrat, 2002:245). Daerah pengujian *Durbin-Watson* dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1 Pengujian *Durbin-Watson*



Sumber: Gujarati, 1995

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika $d < dl$, berarti terdapat *autokorelasi* positif
2. Jika $d > (4-dl)$, berarti terdapat *autokorelasi* negatif
3. Jika $du < d < (4-dl)$, berarti tidak terdapat *autokorelasi*
4. Jika $dl < d < du$ atau $4-du < d < 4-dl$, berarti tidak dapat disimpulkan

Hipotesanya adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi positif

H_1 : tidak ada autokorelasi negatif

3.5.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:110) tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera (J-B) Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan *Jarque Bera (J-B) Test* yang terdapat dalam *eviews 7*. Berikut ini rumus untuk *Jarque Bera (J-B) Test* (Gujarati, 2010:171):

$$JB = n * \frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24}$$

Dimana:

N = ukuran sampel

S = koefisien *skewness*

K = koefisien *kurtosis*, untuk variabel dengan distribusi normal, S= 0 dan K=3

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho : berdistribusi normal

Ha : berdistribusi tidak normal

Apabila probabilitas J-B hitung $> \alpha=0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak yaitu nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila probabilitas J-B hitung $\leq \alpha = 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima yaitu nilai residual tidak berdistribusi normal.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat operasional variabelnya sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja yang dinyatakan dalam satuan persen per tahun periode 2007-2015.
2. Tingkat Upah adalah tingkat upah terendah yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan (Pengusaha), serikat pekerja dan pemerintah kabupaten dan ditetapkan oleh Gubernur. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen per tahun periode 2007-2015.
3. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari publikasi BPS Jawa Timur yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 dan 2010 dengan satuan jutaan rupiah per tahun periode 2007-2015.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat atau penduduk di Bakorwil V Jawa Timur yakni berupa tingkat pendidikan, kesehatan dan standart hidup layak. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen per tahun periode 2007-2015.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bakorwil V Jawa Timur tahun 2007 – 2015. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota Bakorwil V Jawa Timur periode tahun 2007-2015. Hal ini berarti bahwa berapapun tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota Bakorwil V Jawa Timur periode tahun 2007-2015. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka semakin berkurang tingkat pengangguran terbuka.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota Bakorwil V Jawa Timur periode tahun 2007-2015. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka semakin bertambah tingkat pengangguran terbuka.
4. Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di setiap Kabupaten/Kota Bakorwil V Jawa Timur periode tahun 2007-2015.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan perumusan dari hasil penelitian maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun hasil penelitian ini pengaruh UMK tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur namun dalam menentukan seberapa besar UMK pemerintah hendaknya menerapkan sesuai dengan proporsi dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari pihak perusahaan maupun pihak tenaga kerja dan diharapkan nantinya dengan kenaikan tingkat upah dapat mengurangi tingkat pengangguran. Peraturan pengupahan telah diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 perlu dikaji ulang mengingat penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Dalam peraturan tersebut keberadaan KHL akan ditinjau setiap lima tahun sekali sehingga hal ini menyebabkan upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah lebih fokus memperhatikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama pada sektor industri pengolahan yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Bakorwil V Jawa Timur. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan mendorong kenaikan investasi dan memberikan kemudahan prosedur kepada para investor serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung. Selain itu perhatian penuh juga dibutuhkan terhadap sektor-sektor non unggulan supaya menjadi lebih berkembang sehingga perekonomian akan terus mengalami pertumbuhan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Bakorwil V Jawa Timur diharapkan lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih merata, yaitu salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu perlu juga lebih memperhatikan kebijakan publik berkaitan dengan pendidikan penduduk, karena pendidikan merupakan suatu investasi modal manusia yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP.
- Algifari. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. Yogyakarta: BPFE.
- Ali, M. 2009. Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Bandung: PT Imperial Bakti Utama.
- Arifin, M. Y. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ.
- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. Jawa Timur dalam Angka berbagai edisi : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Budiono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Ekananda, Mahyus. 2015. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gani, Irawan dan Amalia, Siti. Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Revisi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- . 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1995. Ekonometrika Dasar, Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: PT. Erlangga.
- . 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
- . 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
- Kistanto, Ilham. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang* Vol. 7, No 1, 2002, ISSN: 1410-2641 hal 45-46.
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1992. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. George. 2003. Pengantar Ekonomi Jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. George. 2007. *Principle of Economics*. Fitria Liza (Penerjemah) dan Imam Nurmawan (Editor). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, M. 2003. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.
- Samuelson, P A, dan W. D. Nordhaus. 1994. Mikro Ekonomi Edisi Ke- XIV, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sisputro, Akbar. 2013. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siswosoemarto, Rubijanto. 2012. Intelijen Ekonomi: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2005. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2008. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, G. 2002. Ekonometrika Pengantar. Yogyakarta: BPFE.

Suparmoko. 1997. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.

Suparmoko dan Ick Rangga Bawana. 2007. *Ekonomi 2 : Yudhistira Quadra*

Supranto, J. 1993. *Metode Ramalan Kuantitatif*. Bandung: Rineka Cipta.

-----, 1995. *Pengantar Statistik*. Jakarta: Bina Aksara.

Todaro, MP dan SC. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta: Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Utomo, Panji Setia. 2013. *Pengaruh Economic Value Added (Eva), Return On Assets (Roa), Return On Equity (Roe), dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Penutupan: Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2011*. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.

Lampiran A

Data Analisis: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), Tingkat Upah (X1), PDRB (X2) dan IPM (X3) sebelum di Ln (Logaritma Natural)

KOTA	TAHUN	TPT	Pert. UMK	PDRB	IPM
Banyuwangi	2007	5,80	9,67	9.242.911	67,24
Banyuwangi	2008	5,62	9,17	9.778.406	67,8
Banyuwangi	2009	4,05	20,19	10.369.987	68,36
Banyuwangi	2010	3,92	10,75	11.022.908	64,54
Banyuwangi	2011	3,71	4,98	11.801.567	65,48
Banyuwangi	2012	3,4	5,78	12.662.356	66,12
Banyuwangi	2013	4,65	18,73	13.511.826	66,74
Banyuwangi	2014	7,17	14,14	14.281.672	67,31
Banyuwangi	2015	2,55	15,00	15.140.000	68,08
Bondowoso	2007	3,65	3,13	2.693.951	60,76
Bondowoso	2008	2,93	11,11	2.836.873	61,26
Bondowoso	2009	2,88	12,73	2.978.985	62,11
Bondowoso	2010	1,59	7,74	3.150.750	59,47
Bondowoso	2011	2,84	10,03	3.353.756	60,48
Bondowoso	2012	3,75	8,84	3.573.386	62,24
Bondowoso	2013	2,04	18,25	3.746.787	63,21
Bondowoso	2014	3,72	16,81	3.936.160	63,43
Bondowoso	2015	1,75	15,00	4.131.000	63,95
Jember	2007	5,57	9,52	9.731.233	63,27
Jember	2008	4,48	12,17	10.319.280	63,71
Jember	2009	4,42	19,38	10.892.032	64,33
Jember	2010	2,71	7,79	11.716.750	59,94
Jember	2011	3,95	5,42	12.521.024	60,64
Jember	2012	3,91	5,14	13.356.591	61,31
Jember	2013	3,94	18,69	14.165.725	62,43
Jember	2014	4,64	16,31	15.043.198	62,64
Jember	2015	4,77	15,00	15.845.000	63,04
Lumajang	2007	4,91	21,32	5.408.328	66,2
Lumajang	2008	4,33	11,11	5.702.636	66,65
Lumajang	2009	2,24	19,09	6.013.973	67,26
Lumajang	2010	3,17	5,04	6.373.823	59,62
Lumajang	2011	2,7	7,66	6.796.226	60,72
Lumajang	2012	4,7	11,43	7.266.528	61,31
Lumajang	2013	2,01	22,60	7.671.857	61,87

Lumajang	2014	2,83	10,68	8.080.673	62,33
Lumajang	2015	2,6	15,00	8.454.000	63,02
Probolinggo	2007	3,48	7,29	5.686.330	60,97
Probolinggo	2008	3,46	6,62	6.014.945	61,44
Probolinggo	2009	2,6	13,00	6.358.414	62,13
Probolinggo	2010	2,02	9,01	6.773.706	59,83
Probolinggo	2011	3,2	9,41	7.179.632	60,3
Probolinggo	2012	1,98	9,15	7.746.077	61,33
Probolinggo	2013	3,3	34,90	8.144.900	62,61
Probolinggo	2014	1,47	12,94	8.543.337	63,04
Probolinggo	2015	2,51	15,00	8.950.000	63,83
Situbondo	2007	5,43	12,96	3.013.034	62,64
Situbondo	2008	3,89	7,61	3.166.904	63,06
Situbondo	2009	2,28	15,09	3.330.496	63,69
Situbondo	2010	3,13	8,20	3.552.856	60,07
Situbondo	2011	4,74	11,06	3.783.553	60,82
Situbondo	2012	3,31	9,48	4.015.444	62,23
Situbondo	2013	3,01	30,59	4.246.148	63,43
Situbondo	2014	4,15	2,19	4.491.703	63,91
Situbondo	2015	3,57	15,00	4.710.000	64,53
Kota Probolinggo	2007	10,42	7,18	1.705.339	72,76
Kota Probolinggo	2008	9,93	6,53	1.808.258	73,29
Kota Probolinggo	2009	8,53	13,00	1.905.390	73,73
Kota Probolinggo	2010	6,85	8,57	2.033.978	67,3
Kota Probolinggo	2011	4,66	9,38	2.162.644	68,14
Kota Probolinggo	2012	5,12	9,19	2.310.510	68,93
Kota Probolinggo	2013	4,48	24,66	2.460.115	70,05
Kota Probolinggo	2014	5,16	13,31	2.606.272	70,49
Kota Probolinggo	2015	4,01	15,00	2.759.000	71,01

Lampiran B

Data Analisis: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), Tingkat Upah (X1), PDRB (X2) dan IPM (X3) setelah di Ln (Logaritma Natural)

KOTA	TAHUN	TPT	Pert. UMK	LOG PDRB	IPM
Banyuwangi	2007	5,80	9,67	16,04	67,24
Banyuwangi	2008	5,62	9,17	16,10	67,8
Banyuwangi	2009	4,05	20,19	16,15	68,36
Banyuwangi	2010	3,92	10,75	16,22	64,54
Banyuwangi	2011	3,71	4,98	16,28	65,48
Banyuwangi	2012	3,4	5,78	16,35	66,12
Banyuwangi	2013	4,65	18,73	16,42	66,74
Banyuwangi	2014	7,17	14,14	16,47	67,31
Banyuwangi	2015	2,55	15,00	16,53	68,08
Bondowoso	2007	3,65	3,13	14,81	60,76
Bondowoso	2008	2,93	11,11	14,86	61,26
Bondowoso	2009	2,88	12,73	14,91	62,11
Bondowoso	2010	1,59	7,74	14,96	59,47
Bondowoso	2011	2,84	10,03	15,03	60,48
Bondowoso	2012	3,75	8,84	15,09	62,24
Bondowoso	2013	2,04	18,25	15,14	63,21
Bondowoso	2014	3,72	16,81	15,19	63,43
Bondowoso	2015	1,75	15,00	15,23	63,95
Jember	2007	5,57	9,52	16,09	63,27
Jember	2008	4,48	12,17	16,15	63,71
Jember	2009	4,42	19,38	16,20	64,33
Jember	2010	2,71	7,79	16,28	59,94
Jember	2011	3,95	5,42	16,34	60,64
Jember	2012	3,91	5,14	16,41	61,31
Jember	2013	3,94	18,69	16,47	62,43
Jember	2014	4,64	16,31	16,53	62,64
Jember	2015	4,77	15,00	16,58	63,04
Lumajang	2007	4,91	21,32	15,50	66,2
Lumajang	2008	4,33	11,11	15,56	66,65
Lumajang	2009	2,24	19,09	15,61	67,26
Lumajang	2010	3,17	5,04	15,67	59,62
Lumajang	2011	2,7	7,66	15,73	60,72
Lumajang	2012	4,7	11,43	15,80	61,31
Lumajang	2013	2,01	22,60	15,85	61,87

Lumajang	2014	2,83	10,68	15,90	62,33
Lumajang	2015	2,6	15,00	15,95	63,02
Probolinggo	2007	3,48	7,29	15,55	60,97
Probolinggo	2008	3,46	6,62	15,61	61,44
Probolinggo	2009	2,6	13,00	15,67	62,13
Probolinggo	2010	2,02	9,01	15,73	59,83
Probolinggo	2011	3,2	9,41	15,79	60,3
Probolinggo	2012	1,98	9,15	15,86	61,33
Probolinggo	2013	3,3	34,90	15,91	62,61
Probolinggo	2014	1,47	12,94	15,96	63,04
Probolinggo	2015	2,51	15,00	16,01	63,83
Situbondo	2007	5,43	12,96	14,92	62,64
Situbondo	2008	3,89	7,61	14,97	63,06
Situbondo	2009	2,28	15,09	15,02	63,69
Situbondo	2010	3,13	8,20	15,08	60,07
Situbondo	2011	4,74	11,06	15,15	60,82
Situbondo	2012	3,31	9,48	15,21	62,23
Situbondo	2013	3,01	30,59	15,26	63,43
Situbondo	2014	4,15	2,19	15,32	63,91
Situbondo	2015	3,57	15,00	15,37	64,53
Kota Probolinggo	2007	10,42	7,18	14,35	72,76
Kota Probolinggo	2008	9,93	6,53	14,41	73,29
Kota Probolinggo	2009	8,53	13,00	14,46	73,73
Kota Probolinggo	2010	6,85	8,57	14,53	67,3
Kota Probolinggo	2011	4,66	9,38	14,59	68,14
Kota Probolinggo	2012	5,12	9,19	14,65	68,93
Kota Probolinggo	2013	4,48	24,66	14,72	70,05
Kota Probolinggo	2014	5,16	13,31	14,77	70,49
Kota Probolinggo	2015	4,01	15,00	14,83	71,01

Lampiran C

Statistik Deskriptif

	TPT	UMK	LOG_PDRB	IPM
Mean	3.977619	12.40869	15.55663	64.19730
Median	3.720000	11.11111	15.60976	63.21000
Maximum	10.42000	34.90152	16.57836	73.73000
Minimum	1.470000	2.194656	14.34927	59.47000
Std. Dev.	1.768330	6.137482	0.635421	3.550130
Skewness	1.609749	1.254617	-0.132751	0.938485
Kurtosis	6.400672	5.277726	1.843812	3.176433
Jarque-Bera Probability	57.56556 0.000000	30.14627 0.000000	3.694064 0.157705	9.329622 0.009421
Sum	250.5900	781.7473	980.0676	4044.430
Sum Sq. Dev.	193.8733	2335.458	25.03309	781.4124
Observations	63	63	63	63

Lampiran D

Hasil Estimasi *Panel Data Model Pooled Least Square (PLS)*

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/01/18 Time: 07:44

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.16977	5.809199	-2.783477	0.0072
UMK	-0.072342	0.026434	-2.736664	0.0082
LOG_PDRB	-0.104161	0.264504	-0.393799	0.6951
IPM	0.353059	0.047644	7.410429	0.0000
R-squared	0.529121	Mean dependent var		3.977619
Adjusted R-squared	0.505178	S.D. dependent var		1.768330
S.E. of regression	1.243906	Akaike info criterion		3.335777
Sum squared resid	91.29089	Schwarz criterion		3.471849
Log likelihood	-101.0770	Hannan-Quinn criter.		3.389295
F-statistic	22.09919	Durbin-Watson stat		1.462187
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran E

Hasil Estimasi *Panel Data Model Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/01/18 Time: 07:45

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.80830	17.31513	1.952529	0.0562
UMK	-0.038819	0.027143	-1.430177	0.1585
LOG_PDRB	-3.018891	0.986859	-3.059092	0.0035
IPM	0.274385	0.091410	3.001685	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.660429	Mean dependent var	3.977619
Adjusted R-squared	0.602766	S.D. dependent var	1.768330
S.E. of regression	1.114516	Akaike info criterion	3.199335
Sum squared resid	65.83371	Schwarz criterion	3.539515
Log likelihood	-90.77904	Hannan-Quinn criter.	3.333129
F-statistic	11.45327	Durbin-Watson stat	1.787655
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F

Hasil Estimasi *Panel Data Model Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: TPT

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/01/18 Time: 07:47

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.698113	8.504211	-1.022801	0.3106
UMK	-0.065257	0.024731	-2.638674	0.0106
LOG_PDRB	-0.483332	0.413708	-1.168294	0.2474
IPM	0.327187	0.064490	5.073435	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.594068	0.2213
Idiosyncratic random			1.114516	0.7787
Weighted Statistics				
R-squared	0.356317	Mean dependent var		2.109002
Adjusted R-squared	0.323587	S.D. dependent var		1.413957
S.E. of regression	1.162899	Sum squared resid		79.78777
F-statistic	10.88665	Durbin-Watson stat		1.613773
Prob(F-statistic)	0.000009			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.512665	Mean dependent var		3.977619
Sum squared resid	94.48122	Durbin-Watson stat		1.362803

Lampiran G

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.415752	(6,53)	0.0063
Cross-section Chi-square	20.595888	6	0.0022

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/01/18 Time: 07:45

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.16977	5.809199	-2.783477	0.0072
UMK	-0.072342	0.026434	-2.736664	0.0082
LOG_PDRB	-0.104161	0.264504	-0.393799	0.6951
IPM	0.353059	0.047644	7.410429	0.0000
R-squared	0.529121	Mean dependent var		3.977619
Adjusted R-squared	0.505178	S.D. dependent var		1.768330
S.E. of regression	1.243906	Akaike info criterion		3.335777
Sum squared resid	91.29089	Schwarz criterion		3.471849
Log likelihood	-101.0770	Hannan-Quinn criter.		3.389295
F-statistic	22.09919	Durbin-Watson stat		1.462187
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran H

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.233836	3	0.0414

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UMK	-0.038819	-0.065257	0.000125	0.0181
LOG_PDRB	-3.018891	-0.483332	0.802736	0.0047
IPM	0.274385	0.327187	0.004197	0.4150

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TPT

Method: Panel Least Squares

Date: 07/01/18 Time: 07:48

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.80830	17.31513	1.952529	0.0562
UMK	-0.038819	0.027143	-1.430177	0.1585
LOG_PDRB	-3.018891	0.986859	-3.059092	0.0035
IPM	0.274385	0.091410	3.001685	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.660429	Mean dependent var	3.977619
Adjusted R-squared	0.602766	S.D. dependent var	1.768330
S.E. of regression	1.114516	Akaike info criterion	3.199335
Sum squared resid	65.83371	Schwarz criterion	3.539515
Log likelihood	-90.77904	Hannan-Quinn criter.	3.333129
F-statistic	11.45327	Durbin-Watson stat	1.787655
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran I

Hasil Uji Multikolinearitas

	UMK	LOG_PDRB	IPM
UMK	1.000000	0.110157	0.156816
LOG_PDRB	0.110157	1.000000	-0.301814
IPM	0.156816	-0.301814	1.000000

Lampiran J

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/01/18 Time: 07:49

Sample: 2007 2015

Periods included: 9

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.973826	10.06709	-0.891402	0.3767
UMK	0.010212	0.015781	0.647105	0.5204
LOG_PDRB	0.329983	0.573764	0.575119	0.5676
IPM	0.069926	0.053146	1.315720	0.1939

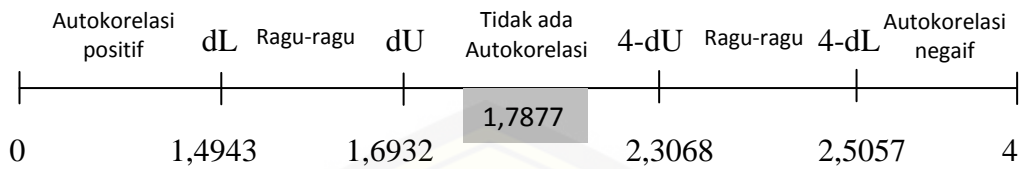
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.204071	Mean dependent var	0.775356
Adjusted R-squared	0.068914	S.D. dependent var	0.671537
S.E. of regression	0.647984	Akaike info criterion	2.114717
Sum squared resid	22.25384	Schwarz criterion	2.454897
Log likelihood	-56.61360	Hannan-Quinn criter.	2.248512
F-statistic	1.509877	Durbin-Watson stat	2.029513
Prob(F-statistic)	0.168683		

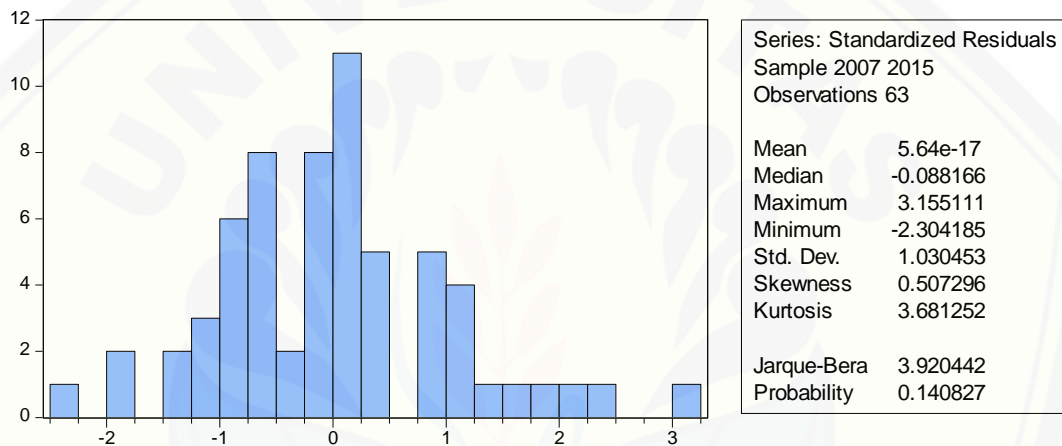
Lampiran K

Hasil Uji Autokorelasi



Lampiran L

Hasil Uji Normalitas



Lampiran M

Hasil *Cross Section Fixed Effect*

	KOTA	Effect
1	Banyuwangi	2.021255
2	Bondowoso	-2.193109
3	Jember	3.139119
4	Lumajang	0.145506
5	Probolinggo	0.092290
6	Situbondo	-1.093067
7	Kota Probolinggo	-2.111995